

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki sebuah instrumen yang menopang sistem keuangan Negara Indonesia pada pemerintah pusat yang dikenal sebagai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Suryanovi (2014) menyatakan bahwa Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, mengklasifikasi dan pengikhtisaran transaksi dan perihal keuangan Pemerintah Pusat, penginterpretasian terhadap hasilnya, serta penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Hamzah dan Kustiani (2014) menyatakan bahwa penyusunan laporan atas pertanggungjawaban APBN/APBD harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah serta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berbeda dengan pemerintah pusat yang memiliki APBN sebagai instrumen sistem keuangannya, pemerintah daerah memiliki APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang digunakan sebagai instrumen keuangan daerahnya. Hal ini terjadi karena Indonesia menganut sistem desentralisasi fiskal yaitu sebuah sistem

dimana wewenang terhadap pengelolaan keuangan di daerah diatur oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut Mulyana (2014) mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan dibahas serta disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Dalam hal desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakatnya. Tentunya sebagai bentuk atas pertanggungjawaban pemerintah daerah atas proses tahunan APBD yang telah berjalan, pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan pembukuan atas kegiatan akuntansinya selama 1 periode. Moenek *et al.* (2020) menjelaskan bahwa akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang melakukan pencatatan dan pelaporan atas hasil dari transaksi keuangan daerah sejalan dengan pelaksanaan APBD.

Pemerintah pusat menerapkan beberapa kebijakan terkait akuntansi pemerintah daerah untuk menjadi sebuah pedoman untuk menyusun dan menyajikan sebuah laporan keuangan yang baik serta andal. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebuah wujud dari tanggung jawab pemerintah daerah kepada rakyat maupun kepada pemerintah pusat terkait kinerja pemerintah daerah tersebut dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan pemerintah daerah dibuat setiap periode oleh pemerintah daerah yang dibagi menjadi 2 yaitu SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) serta PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) selaku Bendahara Umum Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang kemudian disingkat DPU Bina Marga Jawa Timur, merupakan salah satu dari 25 dinas di Provinsi Jawa Timur yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum yang terdiri atas satu sekretariat dan empat bidang. DPU Bina Marga Jawa Timur juga memiliki kewajiban untuk mencatat laporan keuangannya dalam bentuk laporan keuangan SKPD yang secara umum memuat dua bagian utama, yang pertama adalah laporan pelaksanaan anggaran, yang kedua adalah laporan finansial. Laporan Pelaksanaan Anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran serta Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Menurut Hasanah dan Fauzi (2017), Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyediakan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sarana keuangan yang diatur oleh pemerintah pusat/daerah. Untuk laporan finansial terdiri dari Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sejak terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada awal tahun 2020 di Indonesia yang masuk dalam kategori kejadian luar biasa, pemerintah Indonesia melakukan tindakan khusus atas kebijakan keuangan negara untuk menjaga stabilitas sistem perekonomian di Indonesia, diatur pada Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, demikian membuat APBN kita pada tahun 2020 mengalami beberapa perubahan karena adanya revisi atas alokasi pendapatan dan belanja yang lebih diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Hal ini tentu saja dapat menjadi pengaruh kepada realisasi anggaran, terutama pada unsur belanja. Namun, perlu kita ketahui bahwa semakin menuju penghujung tahun 2021, dampak pandemi ini

semakin menurun, kasus Covid-19 di Indonesia juga semakin turun dibandingkan tahun 2020.

Purnomo (2021) dalam jurnalnya yang berjudul *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat*, menyimpulkan bahwa adanya pandemi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sehubungan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan tersebut, belum diketahui secara pasti bagaimana pandemi Covid-19 berdampak pada proses pelaksanaan anggaran satuan kerja di Provinsi Jawa Timur khususnya pada DPU Bina Marga Jawa Timur. Oleh karena itu penulis ingin meninjau seberapa besar dampak pandemi Covid-19 terhadap penerapan akuntansi anggaran serta realisasi anggaran DPU Bina Marga Jawa Timur. Hasil tinjauan ini akan penulis susun dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul **“Penerapan Akuntansi Anggaran dan Realisasi Anggaran hingga Aspek Penyajian dan Pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur pada Masa Pandemi Covid-19”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam studi ini adalah:

1. Bagaimana penerapan kebijakan akuntansi anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana kesesuaian penyajian dan pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur terhadap peraturan yang berlaku?

3. Bagaimana perbandingan realisasi anggaran pada masa sebelum dan saat masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. mengetahui penerapan kebijakan akuntansi anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;
2. mengetahui kesesuaian penyajian dan pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur terhadap peraturan yang berlaku;
3. mengetahui perbandingan realisasi anggaran pada masa sebelum dan saat masa pandemi Covid-19;

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini berfokus pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 tentang kebijakan, pengakuan, penyajian serta pengungkapannya pada DPU Bina Marga Jawa Timur. Serta penyerapan anggaran akibat dari dampak pandemi Covid-19 pada DPU Bina Marga Jawa Timur. Penelitian dilakukan mulai Desember 2021 sampai Maret 2022.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, praktisi akademis, hingga masyarakat umum tentang realisasi anggaran;

2. dapat menjadi sarana informasi bagi pembaca tentang realisasi anggaran pemerintah daerah di masa pandemi Covid-19.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka menyusun karya tulis ini, penulis akan menggunakan beberapa metode, antara lain:

1. Metode Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan dilakukan oleh penulis dengan melakukan pendalaman materi dengan cara membaca, memahami, mempelajari serta mengutip berbagai sumber informasi seperti buku pelajaran, materi kuliah, undang-undang, jurnal, dan materi lainnya yang bisa digunakan sebagai dasar penyusunan KTTA.

2. Metode Penelitian Wawancara

Metode penelitian wawancara dilakukan oleh penulis dengan melakukan tanya jawab dengan Analis Kebijakan Ahli Muda di Subbagian Keuangan DPU Bina Marga Jawa Timur yaitu Ibu Siti Chomiati serta Perencana di Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran DPU Bina Marga Jawa Timur yaitu Bapak Yudha Adiyanto yang mengetahui informasi yang penulis perlukan guna memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.7 Sistematika Penulisan KTTA

Sistematika Penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang yang menjadi dasar bagi penulis untuk menulis karya tulis tugas akhir, rumusan masalah yang

dibuat oleh penulis, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan dari karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menyajikan landasan teori yang menjadi acuan terkait pembahasan yang akan diuraikan dalam bab selanjutnya. Landasan teori yang dibahas antara lain tentang Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran, serta Pandemi Covid-19.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang informasi singkat mengenai objek penulisan karya tulis, DPU Bina Marga Jawa Timur yang terdiri dari profil kantor, visi dan misi, tugas dan fungsi, wilayah kerja, dan struktur organisasi. Selain itu, penulis menguraikan metode yang digunakan beserta pembahasannya. Pembahasan tersebut meliputi pembahasan berupa implementasi kebijakan akuntansi terkait realisasi belanja di DPU Bina Marga Jawa Timur, perbandingan realisasi belanja Kabupaten Berau sebelum dan selama pandemi, serta dampak pandemi terhadap realisasi belanja.

BAB IV SIMPULAN

Bab simpulan berisi hasil rangkuman atas tinjauan yang telah dilakukan penulis pada tiga bab sebelumnya dan penulis harapkan hasilnya dapat dimanfaatkan banyak orang.